

TAJUK RENCANA

'Sunat', PHK dan Beban Perempuan

ADA apa dengan bangsa ini? Dan apa yang terjadi di negeri ini? Pertanyaan yang hanya terendap dalam benak. Di tengah kabar pemutusan hubungan kerja (PHK) di mana-mana, hampir setiap hari masyarakat disuguhi tontonan, pembongkaran kasus-kasus korupsi hingga kerugian negara yang bukan hanya miliar namun ratusan triliun rupiah. Ironisnya, setelah mengaduk-aduk emosi warga, kasus tersebut, entah kelanjutannya.

Kini muncul berita-berita lain yang tidak kalah menaikkan emosi di dalam bulan ramadan. Laman Antara mengabarkan, terungkap di tiga tempat: Bekasi, Bogor dan Tegal, kasus oplosan sekaligus penyuntatan isi tabung gas 12 kg. Sebelumnya, kasus serupa juga terungkap di Bali dan Jombang.

Berita baru ini belum selesai dan 'kian menarik'. Dalam waktu bersamaan, aparat mengungkap kasus penyuntatan MinyakKita. Bahkan Menteri Pertanian menemukan bukti ketidaksesuaian isi dengan yang tertulis di kemasan, saat sidak di sebuah pasar. Sementara, gerakcepat Menteri Perdagangan juga langsung menemukan pabrik yang 'sunat' volume MinyakKita. Pengecer dan distributor di beberapa tempat, disegel.

Luar biasa. Seakan ada 'gawe besar' bernama 'sunatan massal' sedang dihelat negeri ini di beberapa tempat. Sayangnya, ini bukan sunatan massal untuk anak yatim piatu, tapi sunatan produk kebutuhan rakyat kecil. Polda Jawa Tengah turut mengelhat temuan sunatan MinyakKita di Karanganyar. Polda Jateng juga sudah menyatop produksi di Karanganyar yang dilakukan dengan sistem manual (KR, 15/3).

Dalam KBBOnline, sunat adalah *khitan*, *circumcision* merupakan tindakan memotong atau menghilangkan sebagian atau seluruh kulit penutup depan penis. Bagi masyarakat Muslim, sunat adalah hal yang wajib. Ironisnya, kata sunat sudah direduksi sedemikian rupa menjadi setiap pemotongan atau pengurangan adalah 'sunat'. Dan inilah yang terjadi sekarang.

Tentu 'sunatan massal' yang dihelat saat ini tidak ada kaitan dengan efisiensi yang dilantangkan

Presiden Prabowo Subianto. Efisiensi digaungkan dengan munculnya Inpres no 1 tahun 2025 untuk 'keamanan' uang negara. Sedang 'sunatan massal' tampaknya dilakukan pengusaha atau pedagang curang untuk mendapatkan keuntungan pribadi.

Realita ini dapat menjadi ancaman besar bagi kesejahteraan rakyat yang disiapkan menuju Indonesia Emas, Indonesia yang lebih baik dari sekarang. Miris, di tengah PHK, daya beli menurun, pelbagai problema terkait kebutuhan hidup sehari-hari muncul. Maka diakui atau tidak, krisis ekonomi yang dihadapi pemerintah saat ini sangat berimbas pada masyarakat kecil. Ketika daya beli melemah, PHK di mana-mana, nafas ekonomi keluarga terasa kian terengah-engah.

Semua ini dapat dan akan menjadi ancaman sekaligus meningkatkan beban perempuan. Ketika industri atau tempatnya bekerja mengalami persoalan dan harus ditutup atau pengurangan SDM, perempuan bekerja akan terancam menganggur lebih dulu dibanding laki-laki, dengan pelbagai alasan. Mulai dari lelaki adalah tulang punggung dan kepala keluarga hingga tidak banyak 'libur' kerja bagi lelaki seperti cuti haid, cuti melahirkan, sebagaimana diatur undang-undang tenaga kerja. Meski dalam Perppu Cipta Kerja, cuti haid sudah tidak lagi diatur. Di sisi lain, beban perempuan ibu rumahtangga pun kian berat. Ketika kepala keluarga kena PHK, kehidupan ekonomi semakin sesak. Padahal kebutuhan rumahtangga semakin meningkat, karena produknya disunat.

Problema ekonomi yang memudahkan terjadinya kerentanan mental dan sosial masyarakat. Dan perlu disadari, situasi ini memudahkan untuk memicu terjadinya kekerasan dalam rumahtangga (KDRT) khususnya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Waspada, beban perempuan semakin meningkat!

Pertanyaannya, sudahkah dampak pada perempuan menjadi perhatian *stakeholder* di tengah kompleksitas persoalan bangsa? Jika belum ada perhatian, sangat dikhawatirkan akan mengganggu perjalanan menuju Indonesia Emas? □f

Pita Penggaduh di Jalan Raya: Berkah atau Musibah?



BEBERAPA

waktu lalu di media sosial beredar video dua motor yang bertabrakan pada dini hari. Keterangan video tersebut menyebutkan ada korban meninggal pada kecelakaan tersebut. Beberapa waktu kemudian juga beredar video seseorang yang tengah tergeletak di jalan, seperti kejadian pada sore hari ketika lalulintas tengah ramai. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai korban pada kejadian tersebut.

Yang menarik adalah, kedua peristiwa tersebut terjadi pada lokasi yang sama, yaitu Jalan Kaliurang, tepatnya samping Gedung Pusat Universitas Gadjah Mada. Penyebab kecelakaan diperkirakan juga sama, yaitu menghindari polisi tidur kecil-kecil yang berjejer selang-seling pada separuh badan jalan di sepanjang ruas jalan tersebut. Kejadian tersebut wajar menimbulkan pertanyaan, sudah tepatkah pemasangan alat pengatur lalulintas semacam itu?

Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu harus didefinisikan apa jenis alat pengatur lalulintas yang dimaksud. Bila mencermati Peraturan Menteri Perhubungan (PM) Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2018 tentang Alat Pengendali dan Pengaman Pengguna Jalan yang diperbaharui melalui PM 14/2021, alat pengatur tersebut adalah pita pengaduh yang bernama *rumble strip* yang merupakan bagian dari alat pengaman pengguna jalan.

Pita pengaduh sebagaimana disebutkan pada Pasal 33 PM 82/2018 memiliki beberapa fungsi, yaitu mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Memperhatikan fungsi tersebut, tentu keseluruhannya bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, baik pengendara maupun para pengguna jalan lainnya. Lalu mengapa fungsi yang ideal tersebut justru menimbulkan efek negatif yang tidak

Dwi Ardianta Kurniawan

diharapkan?

Beberapa hal dapat diperkirakan sebagai penyebab. Pertama, desain pita pengaduh tidak sesuai dengan ketentuan. Dalam peraturan menteri telah diatur dengan jelas bagaimana desain untuk pemasangan pita pengaduh, baik dari bahan, dimensi dan sebagainya. Aturan tersebut tentu sudah didasarkan pada kajian, sehingga dapat berfungsi dengan baik tanpa harus menimbulkan efek samping yang tidak diharapkan.



KR-JOKO SANTOSO

Dalam penerapannya, desain tersebut tidak selamanya diikuti, misalnya dalam bentuk ketinggian, panjang, maupun bahan yang digunakan. Penyimpangan tersebut dapat berimplikasi pada terjadinya dampak yang tidak diinginkan, misalnya kecelakaan maupun kerusakan pada kendaraan. Pada beberapa kasus, desain yang tidak sesuai standar juga dapat berpengaruh pada kondisi kesehatan pengemudi, misalnya terjadinya kerusakan saraf tulang belakang karena guncangan.

Penyebab kedua, perilaku pengemudi yang tidak sesuai dengan ketentuan. Tujuan pemasangan pita pengaduh salah satunya untuk menurunkan kecepatan pengemudi. Masalahnya, tidak semua pengemudi memahami, atau

memahami namun tidak mau melaksanakan tujuan tersebut. Akibatnya, pengemudi tetap menjalankan kendaraan pada kecepatan normal dengan cara menghindari pita pengaduh bila dimungkinkan.

Pada kasus yang disebutkan pada awal tulisan, terjadinya kecelakaan disebabkan oleh kombinasi kedua hal tersebut. Desain pita pengaduh dibuat hanya pada separuh badan jalan secara berselang-seling, sehingga menyebabkan pengendara cenderung untuk bermanuver menghindari pada sisi jalan lainnya. Hal ini sering tidak hanya dilakukan oleh kendaraan roda dua, namun juga kendaraan roda empat, walau hanya sebagian roda yang dapat menikmati kondisi tanpa guncangan. Dapat dibayangkan bila hal tersebut dilakukan bersamaan oleh kendaraan yang datang dari kedua arah, kecelakaan hampir pasti akan terjadi bila kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan tinggi.

Apa yang harus dilakukan agar kejadian tersebut tidak berulang kembali, tentu kembali ke penyebab terjadinya kecelakaan. Pada jangka pendek, harus dilakukan pemeriksaan desain pita pengaduh agar sesuai dengan standar, misalnya yang dipasang pada Jalan Kaliurang juga Jalan Ngampilan yang terindikasi kurang memenuhi standar. Kedua, yang memerlukan penanganan jangka panjang adalah perubahan perilaku pengemudi. Perlu dicamkan bahwa pita pengaduh tujuannya untuk alat pengaman dan meningkatkan keselamatan pelaku perjalanan, bukan untuk dihindari dan dikalahkan keberadaannya. □d

*) **Dwi Ardianta Kurniawan**, Peneliti Pusat Studi Transportasi dan Logistik (Pustral) UGM.

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email: opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas dan foto diri. Terimakasih.

Kedaulatan Rakyat

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers)
No. 127/SK/MENPEN/SIUPPA.7/1986 tanggal 4 Desember 1990.
Anggota SPS. ISSN: 0852-6486.

Penerbit: PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta,
Terbit Perdana: Tanggal 27 September 1945.

Perintis: H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984).

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019) **Komisaris Utama:** Imam Satriyadi, SH.

Komisaris: Mohammad Wirmon Samawi, SE., MIB.

Direktur Utama: Drs. H.Mohammad Idham Samawi.

Direktur Keuangan: Yuriani Nugroho Samawi, SE., MM., MSc.

Direktur Pemasaran: Fajar Kusumawardhani SE.

Direktur Produksi: Baskoro Jati Prabowo SSoS.

Direktur Litbang, Pengawasan & Bisnis: Yoeke Indra Agung Laksana, SE

Direktur Umum: Ir. Dyah Sardjuningrum Sitawati.

Pemimpin Umum: Drs. H. Mohammad Idham Samawi. **Pemimpin Redaksi/Penganggung Jawab:** Dr Drs H Octo Lampitio MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Dr Ronny Sugiantoro, MM, CHE. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussahada, Drs Widyo Suprayogi. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSoS, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSoS, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Efy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grasis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Kepala TU Langanan: Drs Asri Salman, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Manajer Iklan: Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklan@kr.co.id, iklanryk23@yahoo.com, iklanryk13@gmail.com.

Langganan per bulan termasuk 'Kedaulatan Rakyat Minggu'... Rp 90.000,00, Iklan Umum/Display...Rp 27.500,00/mm klm, Iklan Keluarga...Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Baris/Cilik (min. 3 baris, maks. 10 baris) Rp 12.000,00 /baris, Iklan Satu Kolom (min. 30 mm. maks. 100 mm) Rp 12.000,00 /mm klm, Iklan Khusus: Ukuran 1 klm x 45 mm .. Rp 210.000,00, (Wisuda lulus studi D1 s/d S1, Pernikahan, Ulang Tahun) ● Iklan Warna: Full Colour Rp 51.000,00/mm klm (min. 600 mm klm), Iklan Kuping (2 klm x 40 mm) 500% dari tarif. Iklan Halaman I: 300 % dari tarif (min. 2 klm x 30 mm, maks. 2 klm x 150 mm). Iklan Halaman Terakhir: 200% dari tarif. Tarif iklan tersebut belum termasuk PPN 10%

Alamat Kantor Utama dan Redaksi: Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting)

Alamat Percetakan: Jalan RayaYogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan

Alamat Homepage: <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM.

Bank: Bank BNI - Rek: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro:

Jakarta: Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani.

Wartawan: H Ishaq Zubaeda Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga.

Semarang: Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Wakil: Isdiyanto Isman SIP.

Banyumas: Jalan Prof Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPD, Wakil: Driyanto.

Klaten: Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan: Sri Warsiti.

Kulonprogo: Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Pj. Kepala Perwakilan: Musliikhah. Wakil: Asrul Sani.

Gunungkidul: Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo, Wakil: Wuragil Dedy TP

- Wartawan KR tidak menerima imbalan terkait dengan pemberitaan -

- Wartawan KR dilengkapi kartu pers/surat tugas.

Efek Domino Krisis Fiskal RI



KONDISI

ekonomi Indonesia belakangan ini menunjukkan tanda-tanda mengkhawatirkan. Pemerintah tampaknya mengalami kesulitan dalam mengelola anggaran secara efektif. Salah satu indikatornya adalah pengalihan Sisa Anggaran Lebih (SAL) tahun 2024 sebesar Rp 300 triliun serta efisiensi APBN 2025 sebesar Rp 306 triliun ke Danantara (www.ima-api.org, 25/02). Padahal, selama ini SAL digunakan untuk menjaga roda ekonomi tetap berputar di awal tahun. Kini, dengan hilangnya *buffer* tersebut, dampaknya mulai terasa—dari stagnasi ekonomi hingga keterlambatan pembayaran gaji dan tunjangan bagi ASN dan P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja).

Lebih buruk lagi, laporan realisasi APBN 2025 per Februari belum juga dirilis. Hal ini mengindikasikan bahwa Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mungkin sedang menyusun angka-angka agar tetap terlihat rasional di tengah tekanan fiskal yang besar. Namun, upaya ini tidak serta-merta meningkatkan kepercayaan pasar. Alih-alih meredam kekhawatiran, ketidakpastian ini justru memperburuk sentimen investor. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), terutama saham BUMN yang tergabung dalam Danantara, masih mengalami tren merah, yang mencerminkan keengganan pasar untuk berspekulasi dalam situasi penuh ketidakpastian.

Dilema

Dalam kondisi ini, pemerintah menghadapi pilihan sulit untuk menutupi defisit APBN 2025. Awalnya diproyeksikan sebesar 2,6% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), namun dengan berbagai tekanan fiskal, defisit bisa meningkat mendekati 2,9% dari PDB atau hampir Rp 900 triliun (www.ikpi.or.id, 13/03). Opsi paling cepat untuk menutupi defisit ini adalah berutang. Namun, institusi keuangan global seperti IMF dan Bank Dunia

Meti Astuti

tampaknya tidak seroyal seperti sebelumnya.

Jika opsi utang luar negeri semakin sulit, pemerintah mungkin akan menjual Surat Berharga Negara (SBN) ke publik. Meski ini solusi jangka pendek, namun dampaknya tetap berisiko, terutama jika tidak ada kepercayaan dari investor. Sementara kalau mencetak uang juga menjadi opsi yang berbahaya, karena bisa memperburuk inflasi dan menambah tekanan terhadap daya beli masyarakat.

Dampak ke Dunia Kerja

Ketika pemerintah mengalami kesulitan keuangan, dampaknya tidak hanya dirasakan di level kebijakan makro, tetapi juga di tingkat individu, khususnya para pencari kerja. Saat ini, kondisi pasar tenaga kerja sudah cukup berat, dengan banyak perusahaan yang melakukan efisiensi dalam satu dekade terakhir. Jika beban ekonomi terus meningkat dan daya beli masyarakat melemah, perusahaan pun semakin enggan merekrut karyawan baru.

Bagi lulusan baru yang belum memiliki pengalaman kerja, situasi ini lebih sulit lagi. Dengan peluang kerja yang semakin terbatas, banyak yang terpaksa masuk ke sektor informal atau menjadi pengangguran berkepanjangan. Hal ini menciptakan efek domino bagi daya beli dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan.

Kejelasan Kebijakan

Dalam kondisi ini, pemerintah perlu mengambil langkah yang lebih terarah dan transparan. Kepercayaan pasar tidak bisa dibangun hanya dengan retorika atau kebijakan populis semata. Pertama, segera merilis laporan APBN 2025 untuk menghindari spekulasi liar di pasar. Kejelasan data akan membantu membangun kepercayaan investor dan masyarakat. Kedua, anggaran yang ada bisa

difokuskan untuk sektor yang benar-benar bisa menggerakkan ekonomi, bukan sekadar stimulus jangka pendek yang efeknya cepat habis. Ketiga, pemerintah harus memastikan regulasi dan insentif yang cukup agar sektor swasta tetap mampu menyerap tenaga kerja baru, bukan malah terbebani dengan kebijakan yang mempersempit ruang gerak bisnis. Keempat, pemerintah bisa menjajaki opsi pembiayaan lain, misalnya optimalisasi aset negara yang kurang produktif atau syukur-syukur bisa mengambil alih aset SDA untuk dikonversi menjadi uang, agar tidak hanya masuk ke kantong investor asing atau swasta, tapi kembali kepada rakyat.

Memang krisis fiskal tidak bisa dihindari, tetapi bisa dikelola dengan kebijakan yang lebih cermat dan transparan. Jika tidak segera ditangani, stagnasi ekonomi ini bukan hanya berdampak pada angka-angka makroekonomi, tetapi juga pada kehidupan sehari-hari masyarakat, apalagi generasi muda yang sedang berjuang mencari masa depan. □f

*) **Meti Astuti SEI MEK**, Dosen STEI Hamfara Yogyakarta. *Mahasiswa Doktorat Ekonomi UIN SUKA Yogyakarta.*

Pojok KR

Mulai 15 Maret, Plengkung Gading ditutup total

-- **Kelestarian bangunan dan keamanan pengguna jalan, tetap diutamakan.**

Muhammadiyah luncurkan becak listrik 1912

-- **Tetap komit untuk wong cilik.**

Arus mudik diprediksi mulai pekan depan

-- **Ritual tahunan yang selalu mengharubiru.**

Berabe